



IMPLEMENTASI PROGRAM SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT TERPADU (GANAS MADU) DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

Ridwan Alifaza¹, Rusmini²

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik Fakultas
Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Dosen Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik Fakultas
Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023

ABSTRAK

Wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana salah satunya adalah dibentuknya suatu lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, menyeluruh serta terpadu. Daerah yang tergolong rawan bencana salah satunya adalah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang dalam sepanjang tahun 2019 telah terjadi 149 bencana. BPBD Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) adalah Program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Subang, yang mana masyarakat menjadi bagian penting dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer serta data sekunder dan menggunakan cara triangulasi sumber seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Implementasi menjadi suatu proses, akibat atau dampak, sehingga keputusan yang diterima dapat dilaksanakan. Edward III (1990) berasumsi dalam Tjilen (2019) faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi Penyelenggaraan Program GANAS MADU merupakan penyampaian informasi mengenai program tersebut dari pembuat program kepada pelaksana program dan diefektifkan dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran program serta pihak lain yang berkepentingan. Sumber daya ialah keahlian sumber daya manusia, dana yang tersedia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Adapun disposisi yaitu sikap pelaksana program serta profesionalitas para pelaksana. Struktur Birokrasi program GANAS MADU mempunyai indikator yaitu hubungan koordinasi organisasi pelaksana serta standar operasional prosedur yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan program GANAS MADU diharapkan lebih meningkat dan penyediaan sarana prasarana dapat mencakupi wilayah Kabupaten Subang. Guna melengkapi hasil penelitian diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Key Word: BPBD, GANAS MADU, Kabupaten Subang, Implementasi, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Birokrasi

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mengurangi risiko bencana antara lain dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana. Menurut peraturan tersebut, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yaitu melindungi masyarakat dari dampak bencana. Oleh sebab itu, selaku wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana maka dibentuk suatu lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan terencana, menyeluruh, serta terpadu. Peran BPBD adalah menyusun pedoman serta petunjuk berdasarkan penyelenggaraan pemerintah, serta mengupayakan manajemen darurat, pemulihan dan rekonstruksi terwujud secara menyeluruh, adil dan merata. (UU Nomor 24 2007).

Dilihat dari kondisi wilayahnya sendiri Kabupaten Subang adalah satu daerah yang tergolong rawan bencana. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, longsor, tanah longsor, banjir dan kebakaran adalah beberapa kemungkinan bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Subang

Bencana selama tahun 2019 di Kabupaten Subang telah terjadi sebanyak 149. Bencana yang terjadi sangat beragam seperti, erupsi gunung, angin puting beliung, pohon tumbang, kebakaran hutan, kekeringan, longsor, banjir dan lain-lain (jembatan ambruk, tanggul jebol dan orang hilang).

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Subang yakni BPBD dalam menanggulangi bencana, contohnya adalah membuat program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) yang mana masyarakat menjadi bagian penting dari program tersebut dan menjadi kekuatan utama dalam melaksanakan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, penanganan, serta pasca bencana.

Landasan Teoritis & Legalistik Implementasi

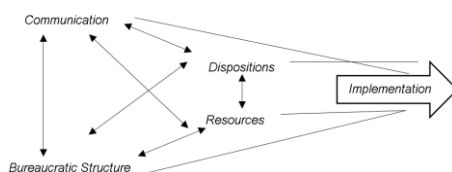
Menurut Winarno (2013:147) "Implementasi dalam arti luas adalah suatu wujud pelaksanaan Undang-Undang yang dimana beberapa faktor pendukung seperti faktor, organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama bekerja untuk menjalankan kebijakan dalam upaya agar meraih tujuan-tujuan dari kebijakan atau program-program yang dibuat". Implementasi juga jika dilihat melalui sisi yang lainnya menjadi suatu proses, akibat atau dampak,

sehingga keputusan yang diterima dapat dilaksanakan.

Ripley dan Franklin berasumsi yang diterjemahkan dalam Winarno (2013:148) bahwa "Implementasi merupakan apa yang akan terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang kemudian memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)". Sehingga Implementasi tersebut membentuk suatu mata rantai yang memfasilitasi tujuan-tujuan kebijakan hingga bisa dicapai selaku hasil dari kegiatan pemerintah.

Edward III (1990) berasumsi dalam Tjilen (2019) faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yakni: 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi

Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan
Edward III



Sumber: Edward III dalam Tjilen (2019:31)

Berdasarkan pada gambar 2.1 terlihat bahwa adanya interaksi antara masing-masing faktor yang lalu bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut ini Peneliti akan menjelaskan

secara rinci mengenai model implementasi kebijakan Edward III:

1. Komunikasi

Edward III berpendapat bahwa faktor pertama yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan ialah komunikasi. Komunikasi menentukan apakah tujuan implementasi kebijakan berhasil dicapai. Ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, implementasi yang efektif akan terjadi. Ada tiga indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan implementasi variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan serta konsistensi.

- Transmisi yang dimaksud adalah komunikasi yang baik mengarah pada implementasi yang baik. Umumnya kesalahpahaman (*miscommunication*) sering terjadi dalam komunikasi, hal ini dikarenakan komunikasi telah mengalami beberapa lapis birokrasi sehingga menimbulkan distorsi di tengah jalan.
- Kejelasan sangat penting untuk diperhatikan bahwa pemahaman diterapkan dalam tujuan. Instruksi atau petunjuk yang tidak jelas dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda, sehingga pada akhirnya tidak sesuai dengan

keinginan, yang nantinya menjadi kesalahan fatal di lapangan.

- c) Konsistinsi mengenai kepastian perintah. Perintah yang dikeluarkan selama pelaksanaan komunikasi harus terus menerus serta jelas. Sebab apabila perintah yang diberikan selalu tidak konsisten, maka akan membingungkan eksekusi adegan.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terbagi dalam beberapa elemen, yakni:

- a) Staf merupakan faktor terpenting di implementasi kebijakan. Kesalahan umum di implementasi kebijakan dikarenakan oleh orang-orang yang tidak patuh, tidak cocok, atau tidak kompeten di bidangnya. Agar suatu kebijakan bisa diimplementasikan dengan benar, harus ada banyak orang yang cakap dan terampil untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- b) Informasi penting untuk implementasi kebijakan. Terdapat dua macam informasi, yang pertama ialah informasi implementasi kebijakan, yaitu ketika pelaksana menerima tugas, dia terlebih dahulu mengetahui apa yang wajib dilaksanakan serta cara menjalankannya. Kedua, informasi data kepatuhan

para pelaksana peraturan pemerintah yang ditetapkan, para pelaksana perlu mengetahui perihal individu lain yang terlibat pada implementasi kebijakan.

- c) Kewenangan biasanya formal, sehingga perintah dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kekuasaan dapat bervariasi dari prosedur ke prosedur. Seseorang dapat memiliki banyak kekuasaan, tetapi tidak cukup efektif untuk menerapkan kebijakan.
- d) Fasilitas fisik ialah faktor terpenting di implementasi kebijakan. Meskipun implementor mempunyai keterampilan, pengetahuan, serta kekuatan yang cukup dalam menjalankan fungsinya, tanpa sarana serta prasarana pendukung, implementasi kebijakan tidak akan sukses.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Merujuk pada pendapat Edward III dalam Agustino (2017:139-140). Dalam hal ini disposisi merupakan tindakan dan kewajiban pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan ataupun program yang hendak dilaksanakan. Artinya disposisi ini terkait dengan kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, sehingga diperlukan komitmen dan wawasan bersama untuk menciptakan pemahaman terhadap kebijakan yang ada.

Perihal yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi ini ialah:

- a) Pengaruh disposisi ataupun sikap pelaksana akan sangat menghambat pelaksanaan kebijakan jika pelaksana yang terdapat tidak menjalankan kebijakan yang diminta oleh pejabat tinggi apalagi menyangkut kepentingan warga negara.
- b) Pengaturan birokrasi dalam hal ini Edward III menuntut agar implementasi kebijakan dengan pengaturan birokrasi harus ditinjau. Hal yang dimaksud ialah dengan pengangkatan dan penunjukan personel dalam birokrasi sebagaimana kemampuan, keterampilan, serta kompetensinya.
- c) Edward III memaparkan bahwa insentif merupakan salah satu cara yang disarankan dalam menanggulangi masalah kecenderungan pelaksana untuk mengubah insentif. Hal ini didasarkan pada fenomena bahwa individu seringkali bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga manipulasi yang intensif ini mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan. Mendorong kinerja para pelaksana kebijakan dengan meningkatkan intensitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada penyesuaian dengan kebutuhan badan birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan publik, yang memiliki peran, pengarah, dan pedomannya masing-masing. Para pelaksana dapat melihat dan memahami apa yang harus dilakukan, mereka memiliki institusi yang telah mendorong dan mendukung mereka, tetapi mereka tidak bisa bertindak apa-apa karena terhalang oleh struktur organisasi tempat kerja. Ada dua hal penting pada struktur organisasi yakni:

- a) Ukuran dasar atau standar operasional prosedur (SOP), di mana SOP memiliki standar standar untuk melakukan pekerjaan, cocok untuk organisasi yang belum mengalami perubahan yang relatif cepat tetapi sulit ditemukan di organisasi yang menginginkan perubahan biasa. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan, semakin besar tantangannya.
- b) Tanggung jawab yang terkait dengan suatu aspek kebijakan tidak hanya dikelompokkan bersama dalam satu instansi, tetapi mereka didistribusikan di antara lembaga yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi. Koordinasi yang makin baik dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan, semakin sedikit peluang yang ada dalam

mengimplementasikan rencana atau kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas Peneliti menyimpulkan dalam mencapai keberhasilan proses implementasi diperlukan pemahaman terkait dari isi kebijakan yang dibuat dan lingkungan dalam implementasi. Isi kebijakan menyangkut tentang ketetapan-ketetapan yang telah dibuat sebagai tolak ukur dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan lingkungan implementasi merupakan pengaruh dalam proses berjalannya implementasi. Pengaruh ini mencakup bagaimana cara berkomunikasi, sumber daya apa yang perlu disediakan, bagaimana menyikapi suatu pelaksanaan dan struktur yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan.

Konsep Program

Pelaksanaan kegiatan memerlukan program yang disepakati bersama oleh semua anggota organisasi. Program merupakan bagian pertama yang harus ada untuk menciptakan suatu kegiatan yang baik. Sebuah program terdiri oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Maksud kegiatan akan dilaksanakan
- 2) Aktivitas yang diperoleh dalam mendapatkan tujuan
- 3) Hukum yang perlu di jadikan pegangan dan prosedur yang mesti dilewati
- 4) Estimasi dana yang diperluka; dan

- 5) Rencana pelaksanaan.

Tayibnapis (2008) berpendapat bahwa program ialah “segala sesuatu yang coba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Joan L. Herman &Cs, 1987, *Evaluator's Handbook*)”. Suatu program dapat berupa sesuatu yang nyata, salah satunya adalah materi kurikuler atau prosedur abstrak (*intangible*). Suatu program dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat informasi yang valid (*reliable*) tentang dampak yang terjadi sehingga dapat dinilai dengan baik dan menjadi kebijakan yang berdampak pada banyak orang (masyarakat).

Dalam jurnal Arifin (2010) program ini merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan program ini adalah seperangkat kegiatan yang mewakili pengembangan atau implementasi kebijakan yang berjalan dengan cara berkelanjutan serta berlangsung pada suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam menggapai tujuan yang diharapkan dan rancangan ataupun rencana memuat tujuan yang saling berkaitan dan saling melengkapi guna menggapai tujuan yang hendak digapai.

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat
(*Community-Based Disaster Preparedness/CBDP*)

Menurut Eade dalam Ulum (2014) Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kelembagaan lokal yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Pengembangan kapasitas mencakup seluruh jaringan hubungan dalam suatu komunitas. Pendekatan berbasis komunitas adalah cara mendasar untuk memberdayakan peserta dan mekanisme yang menarik untuk berbagi ide dari awal.

CBDP bertujuan untuk memperkuat dan membentuk modal sosial baik dalam masyarakat sipil maupun antara aktor masyarakat sipil dan pemerintah dalam rangka mengurangi kerentanan (Pelling dalam Ulum, 2014). Sebuah analisis modal sosial telah menunjukkan bahwa inisiatif CBDP cenderung paling efektif bila dilihat sebagai elemen kunci dalam proses yang lebih luas, pencegahan bencana, perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kelembagaan, daripada sebagai proyek independen yang didasarkan pada fokus dalam jangka pendek.

Peningkatan kapasitas dapat ditunjukkan ke dalam empat bidang utama, yaitu:

1. Menyebarkan Informasi Tentang Pelatihan

CBDP menciptakan ruang di mana manajer bencana dan pejabat

lainnya dapat berbagi informasi dengan peserta lokal dan di mana pengetahuan teknis dan pelatihan dapat diberikan.

2. Meningkatkan kesadaran risiko dan kerentanan

Forum CBDP berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan penyebab kelemahan lokal. Hal ini terutama dapat dicapai melalui kegiatan pemetaan dan penilaian kerentanan dan kapasitas lokal dengan partisipasi masyarakat lokal. Metode terakhir secara khusus dikatakan berpotensi untuk “melepaskan kekuatan dalam masyarakat untuk memperbaiki kelemahan diri sendiri” (Davis dalam Ulum, 2014). Anggota masyarakat yang menganggap hidup atau mata pencaharian mereka sangat berisiko lebih mungkin untuk bekerja sama dengan inisiatif pengurangan risiko bencana yang relevan daripada mereka yang tidak merasa berada dalam situasi rentan.

3. Mengakses pengetahuan dan sumber daya lokal
4. Forum CBDP memungkinkan manajer bencana untuk mengakses ide dan pengetahuan lokal untuk mengembangkan strategi penanggulangan bencana lokal yang tepat dan memobilisasi sumber daya lokal.

5. Memobilisasi Masyarakat Lokal

Saat melaksanakan proyek CBDP, manajer bencana berpartisipasi dalam mengorganisir atau memobilisasi masyarakat. Implementasi proyek berfokus pada pengenalan bentuk-bentuk baru atau mengadaptasi rencana dan organisasi lokal tertentu. Salah satu contohnya adalah munculnya peringatan dini masyarakat yang terkait dengan sistem informasi regional atau Nasional, tetapi itu termasuk unsur kearifan lokal (Howell dalam Ulum, 2014)

Fungsi utama CBDP adalah memobilisasi dan memotivasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana jangka panjang. Dalam praktiknya, kemampuan lembaga CBDP lokal untuk terus tumbuh setelah fungsi dan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada dukungan fasilitator eksternal serta pada manfaat yang dirasakan lembaga tersebut (Allen dalam Ulum, 2014).

Tujuan utama CBDP adalah memberdayakan masyarakat dengan membantu menjadi lebih mandiri. Kekurangan dari pendekatan masyarakat terletak pada relatif lemahnya sumber daya dan pengambilan keputusan, kekuasaan legislatif dan peraturan yang tersedia untuk tingkat lokal, inisiatif aktor dan lembaga di pusat. (Lavell dalam Ulum, 2014).

Berdasarkan teori-teori diatas maka pendekatan CBDP merupakan elemen yang semakin penting dalam pengurangan kerentanan dan strategi manajemen bencana. CBDP mengacu pada tren kebijakan untuk mengembangkan nilai-nilai pengetahuan lokal, kapasitas dan sumber daya, termasuk modal sosial. CBDP dapat berperan tidak hanya dalam merumuskan strategi penanggulangan bencana lokal, tetapi juga dalam konteks perencanaan pembangunan yang lebih luas.

Landasan Legalistik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam pasal 1 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 1 Ayat (5) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana

dijelaskan bahwa
"Penyelenggaraan
penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi."

Pasal 1 Ayat (7) UU Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2007
perihal Penanggulangan Bencana
dijelaskan bahwa "Kesiapsiagaan
adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat
guna dan berdaya guna."

Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU
Republik Indonesia No. 24 Tahun
2007 perihal Penanggulangan
Bencana menerangkan bahwa:

Setiap orang berhak mendapatkan
Pendidikan, pelatihan, dan
keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Serta dalam huruf e
dijelaskan bahwa setiap orang
berhak berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan terhadap
kegiatan penanggulangan
bencana, khususnya yang
berkaitan dengan diri dan
komunitasnya.

Pasal 26 ayat (3) huruf b dalam
Undang-Undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2007
perihal Penanggulangan Bencana
menerangkan bahwa "setiap orang

berkewajiban melakukan kegiatan
penanggulangan bencana".

**Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat**

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
memaparkan bahwa:

Pelindungan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Linmas adalah
segenap upaya dan kegiatan yang
dilakukan dalam rangka
melindungi masyarakat dari
gangguan yang diakibatkan oleh
bencana serta upaya untuk
melaksanakan tugas membantu
penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil
akibat bencana, membantu
memelihara keamanan,
ketenteraman dan ketertiban
masyarakat, membantu kegiatan
sosial kemasyarakatan, membantu
memelihara ketenteraman dan
ketertiban pada saat pemilihan
kepala desa, pemilihan kepala
daerah, dan pemilihan umum,
serta membantu upaya pertahanan
negara.

**Peraturan Kepala BNPB Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pedoman
Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana**

Dalam Perka BNPB No 1 Tahun 2012 perihal Pedoman Desa/Keturahan Tangguh Bencana memaparkan bahwa:

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Serta Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Dalam pasal 1 ayat (1) Perka BNPB No. 12 Tahun 2014 Perihal Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa:

Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko. Dan dampak bencana.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Perihal Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat dijelaskan bahwa

Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas Budaya adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam manajemen risiko bencana serta pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana.

Kerangka Pemikiran

Fokus utama penelitian ini ialah Implementasi Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) yang merupakan inovasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang untuk mengatasi masalah mengenai kebencanaan di daerah Kabupaten Subang seperti:

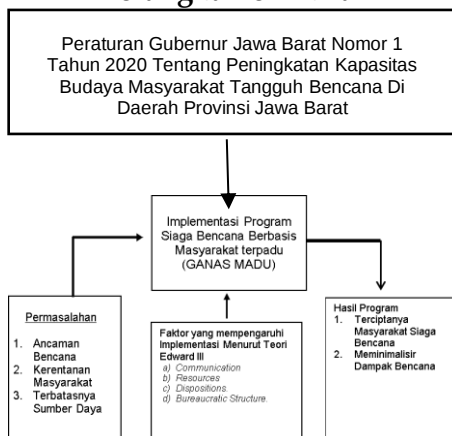
- 1) Ancaman Bencana yang tinggi;
- 2) Kerentanan Masyarakat; dan
- 3) Terbatasnya Sumber Daya.

Secara teoritis, Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh empat

dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, pembuangan, serta struktur birokrasi. Di penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada empat hal tersebut, yang terkait dengan pelaksanaan program GANAS MADU. Asumsinya ialah apabila keempat dimensi tersebut dalam keadaan yang baik maka dengan otomatis akan memiliki dampak positif kepada pelaksanaan rencana GANAS MADU, sehingga tercipta tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui rencana tersebut.

Berikut digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Mengenai metode penelitian yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti menggunakan metode deskriptif disertai pendekatan induktif untuk mengetahui gejala-gejala yang sedang terjadi sehingga objek tersebut dapat diteliti dengan jelas dan cermat

untuk menarik suatu kesimpulan umum.

Operasional Konsep dan Variabel

Tabel 3.2
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi Program GANAS MADU / Teori Edward III	Komunikasi	Pengetahuan dan Pemahaman mengenai Program GANAS MADU
		Mekanisme Program GANAS MADU
		Kejelasan petunjuk perintah yang dilaksanakan
	Sumber Daya	Keahlian SDM
		Dana yang tersedia
		Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
	Disposisi	Sikap dan etika Pelaksana Program
		Profesionalitas Pelaksana
	Struktur Birokrasi	SOP yang ditetapkan
		Hubungan Koordinasi organisasi instansi pelaksana

Sumber: Teori Edward III dalam Agustino (2017:138-147)

Sumber Data dan Informan atau Populasi dan Sampel

a) Sumber Data Primer

Sumber primer ialah sumber data yang mengirimkan data ke

pengumpul data (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, sumber data primer ialah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kesiapsiagaan, serta Warga desa/kelurahan GANAS MADU.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dari orang lain atau dokumen lain (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari arsip-arsip mengenai Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat terpadu (GANAS MADU) yang ada di BPBD Kabupaten Subang.

Tabel 3.3
Data Informan

No	Informan	Jumlah Informan	Status
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	Informan Kunci
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Informan Pendamping 1
3	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	1	Informan Pendamping 2
4	Masyarakat	5	Informan Triangulasi

Sumber: diolah oleh Peneliti Tahun 2021

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Pengukuran yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan data perihal Implementasi Program GANAS MADU di wilayah Kabupaten Subang dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan dua jenis data yakni data primer serta data sekunder dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan cara Triangulasi Sumber untuk mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) di Kabupaten Subang

Komunikasi

Komunikasi Penyelenggaraan Program GANAS MADU merupakan penyampaian informasi mengenai program tersebut dari pembuat program kepada pelaksana program dan diefektifkan dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran program serta pihak lain yang berkepentingan.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai program GANAS MADU, mekanisme program GANAS MADU, dan kejelasan petunjuk pelaksanaan mengenai program GANAS MADU merupakan aspek dari komunikasi, sehingga komunikasi yang dapat tercipta berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Antara pejabat BPBD Kabupaten Subang dengan para pegawai BPBD dalam membuat rancangan program, rancangan anggaran, serta Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program tersebut merupakan komunikasi internal. Seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Subang Tahun 2020. Pelaksanaan mengenai Program GANAS MADU dapat diketahui dan dipahami karena telah dijelaskan dalam RENSTRA dan RENJA tersebut.

Sesuai dengan dasar tujuan dari program GANAS MADU yaitu untuk membentuk masyarakat tangguh dan siaga dalam menghadapi bencana, maka antara anggota BPBD dengan Masyarakat Desa GANAS MADU membentuk komunikasi eksternal. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami program GANAS MADU.

Masyarakat desa merupakan sasaran dalam program GANAS MADU maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang membangun komunikasi eksternal antara BPBD dengan masyarakat desa, contohnya seperti desa Ciater Kecamatan Ciater dan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden.

Salah satu contoh kejelasan petunjuk serta perintah mengenai program GANAS MADU yang telah dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang adalah dengan adanya forum GANAS MADU.

Mekanisme pelaksanaan Program GANAS MADU dimulai dari pendataan, perencanaan, penyesuaian anggaran, serta pelaksanaan.

Sumber Daya

Program GANAS MADU dapat dilaksanakan dengan baik bila sumber daya pelaksana memadai, indikator dari sumber daya itu sendiri ialah

1. Keahlian Sumber Daya Manusia.
2. Dana yang tersedia.
3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang ada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang sendiri Mempunyai jumlah pegawai sebanyak 102 orang yang diantaranya yaitu 42 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 60 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada tahun 2021. Data tersebut diperoleh dari daftar hadir pegawai BPBD Kabupaten Subang pada bulan agustus 2021.

Para pegawai BPBD Kabupaten Subang baik PNS atau TKS telah terlatih dan berpengalaman dalam masalah kebencanaan, tentu sama halnya dengan Program GANAS MADU yang telah dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan program GANAS MADU juga melibatkan masyarakat desa yang tentu sudah mengenal kondisi wilayahnya sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Selain dianggarkan dari APBD Kabupaten Subang pada pelaksanaan program GANAS MADU, BPBD Subang mendapat bantuan dari BNPB dan dana swadaya masyarakat desa GANAS MADU.

Untuk mendukung program GANAS MADU, sarana dan prasarana BPBD Subang mempunyai saran dan prasarana yang cukup, karena mengutamakan keahlian dan pengetahuan masyarakat setempat tentang kebencanaan terutama cara evakuasi pada saat terjadinya bencana adalah dasarnya program GANAS MADU.

Disposisi

Pelaksanaan program GANAS MADU, indikator yang berkaitan dengan disposisi adalah sikap

etika pelaksana program beserta profesionalitas para pelaksana.

Struktur Birokrasi

Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) dalam struktur birokrasi mempunyai indikator yaitu hubungan koordinasi organisasi pelaksana dan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Hubungan koordinasi organisasi pelaksana atau yang sering disebut Struktur Organisasi pada Forum GANAS MADU yang terdapat di setiap desa GANAS MADU

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Forum GANAS MADU



Sumber: BPBD Kab. Subang

Untuk menjalankan setiap kegiatan kebencanaan yang ada dalam program GANAS MADU, salah satu bentuk adanya hubungan koordinasi dalam organisasi forum GANAS MADU adalah struktur organisasi, karena organisasi sangat diperlukan dalam pelaksana program GANAS MADU.

Bencana tidak mengenal waktu dan tempat maka kriteria anggota

Forum GANAS MADU salah satunya adalah masyarakat desa sekitar yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan dedikasi untuk selalu siaga dimanapun dan kapanpun.

Pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan program GANAS MADU selain struktur organisasi, yaitu diperlukannya Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program GANAS MADU

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang bersifat menghambat, menahan, atau menghalangi sesuatu terjadi. Pada program GANAS MADU yang menjadi faktor penghambat yaitu:

- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Sumber Daya manusia menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Sumber daya manusia harus memadai tidak hanya dari kuantitas namun kualitas juga. Menurut pendapat Ketua Forum GANAS MADU di Desa Ciater yaitu Kang Pupu, dia mengatakan bahwa pelaksanaan program GANAS MADU di desanya tersebut memiliki kendala yaitu kurangnya antusias warga dalam melaksanakan program tersebut. Beliau menjelaskan bahwa faktor

dari kurang antusias warga dikarenakan pada saat program berlangsung ada Sebagian warga yang sedang bekerja sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut.

- b. Sarana Prasarana belum memadai

Sarana prasarana merupakan salah satu aspek penting dari pelaksanaan program GANAS MADU karena merupakan alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program GANAS MADU tersebut, namun pada pelaksanaan program tersebut terdapat kendala yaitu sarana prasarana kebencanaan yang terdapat di desa GANAS MADU masih kurang memadai. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kang Edi selaku ketua Forum GANAS MADU Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden, beliau menjelaskan bahwa:

“saat kegiatan sosialisasi penggunaan alat kebencanaan dari BPBD para anggota Forum dapat memahami dan mempraktikan, namun kami belum memiliki alat tersebut sehingga yang kami takutkan pada saat terjadinya bencana kami belum memiliki alat yang memadai untuk menanggulangi bencana tersebut.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber diketahui bahwa sarana prasarana untuk pelaksanaan program GANAS MADU yang dimiliki desa masih

kurang, masyarakat masih mengandalkan tenaga dan ilmu yang mereka miliki. Adapaun alat yang mereka miliki merupakan hasil swadaya dari anggota Forum serta masyarakat desa tersebut. Hal ini mempunyai pengaruh penting pada kinerja yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program tersebut.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala sesuatu yang bersifat mendukung, menarik, atau memudahkan sesuatu terjadi. Pada program GANAS MADU yang menjadi faktor pendukung yaitu para anggota GANAS MADU yang mendapat binaan dan pelatihan dari instansi lain seperti Forum GANAS MADU Desa Ciater yang berada di bawah binaan BNPB serta Forum GANAS MADU Desa Sukamulya yang mendapat binaan dari Pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa Faktor pendukung dalam program GANAS MADU ialah pihak lain yang turut mendukung dalam hal pembinaan serta pelatihan masyarakat anggota Forum GANAS MADU seperti yang terdapat di Desa Ciater serta Desa Sukamulya.

Upaya BPBD dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada program GANAS MADU

Upaya yang dilakukan BPBD untuk mengatasi hambatan yang

terdapat dalam pelaksanaan program GANAS MADU yaitu:

1) Membuat lomba antar desa GANAS MADU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang membuat lomba antar desa GANAS MADU guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program GANAS MADU.

Lomba GANAS MADU ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan forum GANAS MADU antar desa serta menilai sejauh mana pengetahuan serta keterampilan setiap forum GANAS MADU dalam melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bencana.

Dalam pelaksanaan lomba ini, para peserta yang berasal dari Forum GANAS MADU masing masing desa akan bersaing memperebutkan juara satu, adapun materi yang di lombakan yaitu tentang kegiatan penanggulangan bencana serta evakuasi korban.

Dengan adanya lomba GANAS MADU masyarakat menjadi lebih mengetahui dan memahami cara-cara penanggulangan bencana terkhusus mengenai kesiapsiagaan serta cara evakuasi korban bencana.

2) Memberikan pinjaman alat kebencanaan

BPBD selalu siaga setiap waktu Ketika mendapat laporan

terjadinya bencana dari forum GANAS MADU di desa maka personil BPBD langsung menuju daerah tersebut dengan membawa peralatan yang di butuhkan untuk menanggulangi bencana tersebut. Contohnya pada tahun 2020 terdapat bencana banjir di desa sukamulya maka personil BPBD langsung menuju daerah tersebut dengan membawa perahu karet guna melakukan evakuasi korban yang terdampak bencana banjir di desa Sukamulya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Dibuktikan dengan dapat dilaksanakannya dengan baik setiap indikator implementasi program GANAS MADU oleh BPBD Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Program Berbasis Masyarakat Terpadu sudah berjalan baik, akan tetapi jumlah desa GANAS MADU di Subang masih belum bisa mencapai target tahunan yang telah terdapat pada RENJA BPBD Kabupaten Subang Tahun 2021.
- 2) Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program GANAS MADU yaitu kurangnya partisipasi warga desa dalam

pelaksanaan program GANAS MADU dikarenakan kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan hari kerja masyarakat desa serta sarana dan prasarana di desa yang kurang memadai untuk penanggulangan bencana di desa. Sedangkan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan program GANAS MADU yaitu pihak lain yang turut mendukung berjalannya program GANAS MADU dengan cara membina dan melatih masyarakat desa GANAS MADU perihal penanggulangan bencana serta memberi bantuan alat-alat yang diperlukan untuk penanggulangan bencana.

- 3) Adanya hambatan dalam pelaksanaan program GANAS MADU membuat BPBD Kabupaten Subang harus berupaya untuk mengatasi Hambatan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain membuat Lomba Desa GANAS MADU guna meningkatkan antusias masyarakat dalam pelaksanaan program GANAS MADU serta memberikan pinjaman alat penanggulangan

bencana Ketika terjadi bencana di daerah desa GANAS MADU guna memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana di daerah desa GANAS MADU.

Saran

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang perlu lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program GANAS MADU agar target tahunan untuk Program GANAS MADU dapat tercapai.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang diharapkan mampu untuk melaksanakan program dengan metode yang lebih mendekatkan dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan dapat meningkat serta diharapkan mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi bagi forum GANAS MADU yang ada di setiap desa di wilayah Kabupaten Subang.
- 3) Sehubungan dengan penelitian ini, guna

melengkapi hasil penelitian peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan fokus yang serupa namun memakai pendekatan atau metode lain yang berbeda sehingga bisa menemukan fakta maupu data terbaru dalam upaya pelaksanaan Program GANAS MADU di Kabupaten Subang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwiwaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada perundang-undangan periode 2014-2020*. Bandung: Manggu.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Arifin, Zaenal. 2010. "Jurnal Evaluasi Program." *Jurnal Evaluasi Program* 1(1).
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. Haidir. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Sangadji, Eta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Satori, Djam'an dan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudaryono. 2018. *Metode Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo, Dradjat. 2011. "Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana.", *Cakrawala Pendidikan*, 174.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Inovasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjilen, Aalexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. 2020th ed. ed. M.Si. Frans Papilaya, S.E. Bandung: Nusa Media.
- Ulum, M. Chazienul. 2014. *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: UB Press.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Keturahan Tangguh Bencana
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat
- Sumber Lainnya**
- beritasubang.com. 2021. "Penanggulangan Bencana Di Subang, Kang Akur Lantik Ganas Madu." <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1332047993/penanggulangan-bencana-di-subang-kang-akur-lantik-ganas->

madu?page=2 (Diakses 24 Agustus, 2021).

Prokompim-subang.id. 2021.
"Kang Akur Resmi Melantik
Pengurus Ganas Madu."
<https://prokompim-subang.id/2021/06/12/kang-akur-resmi-melantik-pengurus-ganas-madu-kabupaten-subang/>. (Diakses 24 Agustus, 2021).